



Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMP Negeri 1 Sampolawa Tahun Ajaran 2023/2024

Muhammad Zamri Adha Musyarfan^{1)*}, Karsadi², Muh. Yusuf,³ Sulfa⁴ 

^{1,2,3,4}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia.

*Corresponding Author, E-mail: zamrimuhammad275@gmail.com

Diterima: 19 November 2024 **Direvisi:** 27 Februari 2025 **Disetujui:** 17 Maret 2025 **Dipublikasi:** 8 April 2025

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan implementasi dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan; 2) mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini berjumlah 2 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah sehingga berjumlah. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles & Huberman, dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) implementasi dana bantuan operasional sekolah yang diterapkan di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: a) Mekanisme penganggaran; b) Pelaksanaan dan penatausahaan; c) Pertanggung jawaban; 2) Hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, yaitu: 1) hambatan pengawasan; 2) hambatan sumber daya; 3) hambatan komunikasi; dan 4) hambatan struktur birokrasi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa mekanisme penganggaran yang efektif sangat penting untuk memastikan alokasi dana yang tepat dan efisien di tingkat sekolah. Pelaksanaan dan penatausahaan yang baik juga diperlukan untuk memastikan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Implementasi, Dana, Bantuan Operasional Sekolah.

Implementation of School Operational Assistance Funds (BOS) at SMP Negeri 1 Sampolawa for the 2023/2024 Academic Year

Abstract: The purpose of this study was to: 1) describe the implementation of school operational assistance funds at SMP Negeri 1 Sampolawa, Sampolawa District, South Buton Regency; 2) describe the obstacles in the management of school operational assistance funds at SMP Negeri 1 Sampolawa, Sampolawa District, South Buton Regency. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The subjects of this study were 2 people consisting of the Principal and the School Treasurer, so that the total was. Data collection was carried out through observation and interview methods. The data analysis technique used was the Miles & Huberman model, with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: 1) the implementation of school operational assistance funds applied at SMP Negeri 1 Sampolawa, Sampolawa District, South Buton Regency, was carried out in several stages, namely: a) Budgeting mechanism; b) Implementation and administration; c) Accountability; 2) Obstacles in the management of school operational assistance funds at SMP Negeri 1 Sampolawa, Sampolawa District, South Buton Regency, namely: 1) supervision obstacles; 2) resource obstacles; 3) communication obstacles; and 4) bureaucratic structure obstacles. The conclusion of this study is that an effective budgeting mechanism is very important to ensure the allocation of funds appropriately and efficiently at the school level. Good implementation and administration are also needed to ensure transparent and accountable use of funds.

Keywords : Implementation, Funds, School Operational Assistance.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (10) dijelaskan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikan dalam menghadapi tantangan perubahan dalam kehidupan baik secara lokal, nasional maupun global. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat agar dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih berkualitas serta terjangkau dalam pemberian pelayanan pendidikan yaitu dengan membuat suatu program dengan penyaluran dana yang disebut dengan dana bantuan operasional sekolah atau biasa dikenal dengan sebutan dana BOS. Program

pemberian dana tersebut adalah bantuan operasional sekolah atau yang lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan nama dana BOS (Hidayah & Riyadi, 2023). Van Meter dan Van Horn mengemukakan Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Septian & Suryaningsih, 2019).

Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Oleh karena keterbatasan dana Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah pusat, maka biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lainnya, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah daerah. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), selain dari pada dana yang diperoleh dari pemerintah daerah atau sumber lain yang sah (Dini, 2023).

Berdasarkan pada Permendiknas No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan yang ada termasuk SMP, harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun (Sari & Saputro, 2023). Tujuan DANA BOS pada SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk: 1) Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS; 2) Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah; 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau 4) Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat (Aditya Nugraha, Nurul Khoiriah Hairani, & Rizki Prisila 2023).

Pada pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS di sekolah masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi mulai dari tingkat penyusunan anggaran, penggunaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban BOS (Sine, dkk., 2021). Perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didasarkan pada Petunjuk Teknis (juknis) dari Kementerian Pendidikan. Wakil kepala sekolah bagian keuangan menyatakan bahwa perencanaan dana BOS untuk tahun 2024 sudah direncanakan pada akhir tahun 2023. Proses ini diawali dengan mengadakan rapat Tim BOS yang dihadiri oleh perwakilan siswa (OSIS), komite sekolah, dan perwakilan orang tua. Dalam rapat tersebut, dibahas item-item yang akan dianggarkan dalam dana BOS, disusun berdasarkan skala prioritas (Waruwu, dkk., 2024).

Proses penyusunan diawali dengan mengumpulkan kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia, kemudian akan diajukan kepada tim anggaran. Tim anggaran terdiri dari Kepala Sekolah, guru dan komite sekolah. Tim anggaran sekolah akan membuat penyusunan konsep mengenai pemasukan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan akan dilakukan sosialisasi dengan Komite Sekolah untuk dimintai pertimbangan mengenai kegiatan yang telah direncanakan oleh tim anggaran. Evaluasi diri sekolah dilakukan 1 tahun sekali terakhir dilakukan 2019, dan di tahun 2020 dan 2021 sekolah tidak melakukan evaluasi diri sekolah. Sekolah menyusun RKAS mengacu pada prinsip akuntabilitas, karena semua yang direncanakan harus berdasarkan Juknis dan dapat di pertanggung jawabkan (Suryadi, dkk., 2023). Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat (Septian & Suryaningsih, 2019).

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dan data observasi yang diperoleh, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 1 Sampolawa, dengan harapan akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi Dana Operasional Sekolah.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti akan memberikan gambaran secara ilmiah dari data dokumentasi dan data lainnya. Sumber data merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer juga merupakan data penting dalam mengungkapkan masalah dalam penelitian ini, dan data primer ini langsung didapatkan dari hasil observasi atau wawancara beberapa pihak yang berwenang terutama data yang diperoleh kepala sekolah dan bendahara

bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang lokasi penelitian. Maka dengan pengertian tersebut informan dapat dikatakan sebagai responden. Adapun informasi penelitian adalah subjek yang memahami objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan.

Metode pengumpulan data adalah Teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, melalui kepustakaan dan dokumentasi mengenai implementasi dan hambatan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles & Huberman, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Sampolawa

Implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah proses pengelolaan dan penggunaan dana yang diterima oleh sekolah dari pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan operasional sekolah, seperti pembayaran gaji guru, belanja peralatan pendidikan, pemeliharaan gedung sekolah, dan kebutuhan administratif lainnya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses implementasi ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) biasanya dilakukan oleh pihak sekolah dengan bimbingan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat.

1. Mekanisme Penganggaran

Mekanisme penganggaran untuk dana bantuan operasional sekolah biasanya melibatkan proses penyusunan anggaran oleh pihak sekolah berdasarkan kebutuhan operasional dan program kerja yang telah disusun. Anggaran ini kemudian diajukan kepada instansi atau pemerintah setempat yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana bantuan operasional.

implementasi dana bantuan operasional sekolah terkait mekanisme penganggaran adalah bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penganggaran tersebut seperti meliputi : Efektivitas penggunaan dana: evaluasi apakah dana bantuan operasional tersebut digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, seperti pembelian peralatan, pemeliharaan gedung, atau pelatihan guru. Transparansi pengelolaan : perlu diperhatikan apakah pengelolaan dana bantuan operasional dilakukan secara transparan, termasuk proses pengelolaan, pelaporan penggunaan dana, dan akuntabilitas. Pengaruh terhadap kinerja sekolah : tinjau apakah implementasi dana bantuan operasional tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kinerja sekolah, seperti peningkatan prestasi akademik siswa, peningkatan fasilitas sekolah, atau peningkatan kesejahteraan guru dan staff. Kepatuhan terhadap mekanisme penganggaran : evaluasi sejauh mana sekolah mematuhi mekanisme penganggaran yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan dana sesuai dengan alokasi yang telah disetujui. Kemudian pentingnya transparansi anggaran dan juga keterlibatan bendahara dan seluruh pegawai sekolah terkait mekanisme penganggaran dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai mekanisme penganggaran dana bantuan operasional sekolah peneliti melihat bahwa implementasi dana bantuan operasional sekolah terkait mekanisme penganggaran yaitu mekanisme penganggarnya dapat bervariasi tergantung pada negara dan kebijakan pendidikan yang berlaku di sana. Sebagai contoh, dalam beberapa negara, dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat dialokasikan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah, kebutuhan khusus sekolah, atau kriteria lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan terkait.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Dalam pelaksanaan dan penatausahaan yaitu apabila setelah anggaran disetujui, dana bantuan operasional disalurkan kepada sekolah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Sekolah bertanggung jawab dalam penggunaan dana tersebut sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pelaksanaan dan penatausahaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam proses penatausahaan dan pembukuan pengeluaran dana BOS dilakukan secara praktis di sekolah SMP Negeri 1 Sampolawa ada beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sampolawa seperti: pembagian tugas, pengumpulan dokumen, penginputan data, verifikasi dan persetujuan, melakukan pembayaran, rekonsiliasi dan pelaporan, dan

pemeliharaan dokumen. Kemudian yang dilakukan oleh Bendahara sekolah Sekolah SMP Negeri 1 Sampolawa terkait memastikan keakuratan dan kecukupan dokumentasi terkait penggunaan dana BOS di sekolah SMP Negeri 1 Sampolawa, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bendahara sekolah seperti pemantauan transaksi, verifikasi dokumen, penyimpanan dokumen, penginputan data yang akurat, rekonsiliasi berkala, kolaborasi dengan tim keuangan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terkait pelaksanaan dan penatausahaan dana BOS di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Peneliti melihat bahwa dalam pelaksanaan dan penatausahaan di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan mereka sudah melakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, Kepala Sekolah dan Bendahara telah mencatat transaksi pengeluaran yang mereka gunakan dan disimpan dalam penatausahaan keuangan sekolah, interaksi pihak terkait dalam pengelolaan dana bos, seperti komunikasi antara Kepala Sekolah dan tim keuangan, diskusi dalam rapat komite sekolah, atau pertemuan dengan pihak terkait lainnya mereka juga sudah penuh hal itu.

3. Pertanggung Jawaban

Sekolah harus melakukan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan operasional yang telah diterima. Hal ini meliputi penyampaian laporan keuangan dan kegiatan secara periodik kepada pihak yang memberikan dana, serta dapat melibatkan proses audit untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama responden kepala sekolah dan juga responden bendahara sekolah SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton dalam implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) terkait pertanggung jawaban dari Kepala Sekolah dan juga bendahara sekolah, terdapat beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan juga yang dilakukan oleh bendahara sekolah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Sekolah seperti penyusunan rencana penggunaan dana, pendokumentasian pengeluaran, melakukan persetujuan dan penandatanganan, melakukan pemeriksaan dan verifikasi, melakukan pelaporan, serta melakukan audit terhadap pertanggung jawaban penggunaan dana BOS tersebut. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh bendahara sekolah adalah seperti : melakukan pengelolaan dana, melakukan catatan transaksi, melakukan pemeriksaan dokumen, melaksanakan kepatuhan terhadap ketentuan, melakukan pelaporan dan verifikasi, serta melakukan keterbukaan dan konsultasi dalam pertanggung jawaban dalam implementasi dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai pertanggung jawaban terkait implementasi dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Peneliti melihat bahwa, pertanggung jawaban dalam implementasi dana bantuan operasional sekolah pihak sekolah melibatkan beberapa tahapan. Pertama, dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait penggunaan dana BOS dari laporan keuangan dan dokumentasi lainnya. Selanjutnya, dilakukan verifikasi terhadap setiap pengeluaran yang telah dicatat dalam laporan keuangan untuk memastikan keakuratan dan kelayakan penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti juga melihat bahwa tahap berikutnya yang mereka lakukan adalah melakukan pemantauan langsung terhadap penggunaan dana BOS melalui kunjungan ke sekolah dan interaksi dengan stakeholder terkait, seperti kepala sekolah, bendahara sekolah, komite pengelola dana, dan orang tua siswa, ini mencakup pengecekan terhadap infrastruktur sekolah, pembelian barang atau jasa, serta kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lain yang didukung oleh dana BOS.

B. Hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 1 Sampolawa

Hambatan-hambatan dalam dana bantuan operasional sekolah (BOS) merujuk kepada segala macam kendala atau tantangan yang dapat menghambat proses pengelolaan dana BOS di sekolah. Ini mencakup berbagai faktor seperti pengawasan yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya, masalah dalam komunikasi, dan kelemahan dalam struktur organisasi sekolah yang dapat mengganggu penggunaan dana secara optimal. Hambatan-hambatan ini dapat mempengaruhi kinerja sekolah dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Hambatan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Kabupaten Buton Selatan, meliputi:

1. Hambatan Pengawasan

Hambatan pengawasan merupakan kesulitan dalam mengawasi penggunaan dana secara efektif dan efisien. Beberapa hambatan pengawasan dana bantuan operasional sekolah meliputi kurangnya transparansi dalam penggunaan dana, kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak berwenang, potensi penyalahgunaan dana oleh pihak sekolah, dan kurangnya sumber daya untuk melakukan audit dan pemantauan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama responden kepala sekolah dan juga responden bendahara sekolah di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan bahwa ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Sekolah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah seperti : meningkatkan transparansi, penguatan komite sekolah, peningkatan pemantauan, melakukan pelatihan dan pembinaan, dan melakukan kolaborasi dengan pihak terkait. Sedangkan yang dilakukan bendahara sekolah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu seperti peningkatan dokumentasi dan pencatatan, melakukan pelatihan dan pemahaman, melakukan kolaborasi dengan komite sekolah, melakukan pemeriksaan internal, dan melakukan penggunaan teknologi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan bendahara sekolah di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS menunjukkan bahwa kedua pihak telah bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa temuan observasi yang signifikan meliputi keterlibatan aktif kepala sekolah. Kepala sekolah secara aktif terlibat dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara semua pihak terkait, memastikan transparansi dalam penggunaan dana BOS, serta memberikan dukungan dan bimbingan kepada bendahara sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Peningkatan dokumentasi dan pemantauan kedua pihak telah meningkatkan proses dokumentasi dan pencatatan setiap pengeluaran dana BOS secara rinci dan akurat. Mereka juga telah melakukan pemantauan yang lebih cermat terhadap penggunaan dana BOS, baik secara manual maupun dengan bantuan teknologi. Kolaborasi yang efektif kedua pihak bekerja sama secara erat dengan komite sekolah dalam mengambil keputusan terkait penggunaan dana BOS serta memastikan adanya kontrol internal yang efektif. Mereka juga telah menjalin kerjasama dengan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Badan Pengawas Keuangan, untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan dalam meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS. Penerapan pelatihan dan pembinaan : kedua pihak telah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada staf sekolah, terutama yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, mengenai prosedur penggunaan dana BOS dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Pemeriksaan internal yang berkala: kedua pihak secara berkala melakukan pemeriksaan internal terhadap penggunaan dana BOS untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi dan menangani potensi masalah atau penyimpangan sebelum menjadi lebih besar.

2. Hambatan Sumber Daya

Hambatan sumber daya merupakan keterbatasan sumber daya seperti dana, tenaga kerja, dan infrastruktur untuk mengelola dana dengan baik. Hambatan sumber daya dana bantuan operasional sekolah bisa meliputi alokasi dana yang tidak memadai, keterlambatan pencairan dana, atau kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan dana sesuai kebutuhan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama responden dan Kepala Sekolah dan bendahara sekolah upaya yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan bendahara sekolah SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia adalah seperti mengimplementasikan sistem pengelolaan sumber daya yang terencana dan terukur, mendorong kolaborasi antar staf dan unit, mengadopsi teknologi untuk mengotomatisasi proses administrasi dan monitoring penggunaan sumber daya, dan serta menerapkan sistem pemantauan dan pengendalian pengeluaran secara ketat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait upaya memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, peneliti melihat beberapa temuan adalah adopsi teknologi telah membantu dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan pengelolaan sumber daya. Kolaborasi antar staf dan unit telah terlihat dalam penggunaan sumber daya bersama. Terdapat kesadaran yang meningkat di kalangan staf dan siswa tentang pentingnya penggunaan sumber daya secara efisien. Evaluasi teratur dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan dalam penggunaan sumber daya. Transparansi dalam penggunaan sumber daya telah memungkinkan pemantauan yang lebih efektif dan pengambilan keputusan yang tepat.

3. Hambatan Komunikasi

Hambatan komunikasi merupakan kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak terkait, seperti sekolah, pemerintah, dan pihak donatur, dapat menyulitkan koordinasi dan pengambilan keputusan. Hambatan komunikasi dana bantuan operasional sekolah bisa terjadi karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penggunaan dan pengawasan dana, serta kurangnya pemahaman tentang prosedur penggunaan dana di antara pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara terkait langkah-langkah untuk meningkatkan komunikasi efektif yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan bendahara sekolah adalah dengan melalui pertemuan rutin, laporan keuangan transparan, dan saluran komunikasi terbuka, kami telah meningkatkan komunikasi yang efektif terkait penggunaan dana BOS di sekolah ini khususnya di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti maka peneliti melihat bahwa terkait langkah-langkah untuk meningkatkan komunikasi efektif hasil observasi menunjukkan bahwa langkah-langkah seperti pertemuan rutin, laporan keuangan yang terperinci, dan saluran komunikasi terbuka telah meningkatkan pemahaman dan keterlibatan semua pihak terkait dalam penggunaan dana BOS di sekolah di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan.

4. Hambatan Struktur Birokrasi

Hambatan struktur birokrasi dalam implementasi dana bantuan operasional sekolah merupakan tantangan yang meliputi proses administratif yang kompleks, regulasi yang ambigu, kendala dalam pengelolaan dan pelaporan dana, lambatnya respon birokrasi terhadap permintaan atau masalah, dan potensi korupsi atau penyalahgunaan dana oleh pihak yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti bersama responden kepala sekolah dan juga bendahara sekolah SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan bahwa sengan strategi pengelolaan dana BOS yang efisien dan proses pelaporan yang teratur, kami berhasil memastikan penggunaan dana BOS yang efisien dan akuntabel di tengah hambatan birokrasi yang ada.

Berdasarkan hasil observasi peneliti maka peneliti melihat bahwa menunjukkan bahwa strategi yang telah diimplementasikan telah membantu dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. Tim internal yang terbentuk bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi, sementara proses pelaporan yang teratur memastikan bahwa pertanggungjawaban dana BOS dilakukan dengan tepat waktu dan akurat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: *pertama*: implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu: 1) Mekanisme penganggaran yaitu proses pengalokasian dan penentuan anggaran untuk keperluan operasional sekolah; 2) Pelaksanaan dan penatausahaan yaitu pelaksanaan penggunaan dana secara efisien dan penatausahaan yang akurat; dan 3) Pertanggung jawaban yaitu menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Kedua*, hambatan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 1 Sampolawa, yaitu: 1) hambatan pengawasan yaitu kesulitan dalam mengawasi dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan; 2) hambatan sumber daya yaitu keterbatasan sumber daya baik dalam hal finansial maupun SDM yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah; 3) hambatan komunikasi yaitu kendala dalam komunikasi antara pihak-pihak terkait yang dapat menghambat koordinasi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah; dan 4) hambatan struktur birokrasi yaitu faktor-faktor dalam struktur birokrasi yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana, seperti prosedur yang rumit, lambatnya respon, dan kebingungan dalam pembagian tanggung jawab.

Untuk meningkatkan implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dan mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaannya, disarankan agar dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penganggaran untuk memastikan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan aktual sekolah, dan melibatkan semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana serta dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana dengan mempublikasikan laporan pengelolaan dana secara berkala kepada seluruh pihak terkait dan memperkuat peran dan kapasitas lembaga pengawas untuk melakukan pemantauan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, D. E. N., & Riyadi, S. (2023). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Di SMP Negeri 4 Kota Mojokerto). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 221-226. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.2038>
- Kebudayaan, R., & Dini, P. A. U. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Banjarbaru. <https://doi.org/10.35972/jieb.v9i3.1236>
- Nugraha, A., Hairani, N. K., & Prisila, R. (2023). Strategi Pengelola Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. *PEMA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 75-80. <https://doi.org/10.56832/pema.v3i2.355>
- SARI, S. I., & SAPUTRO, R. S. (2023). Implementasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMPIT Hidayah Klaten. *SECONDARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah*, 3(2), 165-175. <https://doi.org/10.51878/secondary.v3i2.2242>
- Septian, R., & Suryaningsih, M. (2019). Implementasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pengembangan Guru dan Fasilitas Sekolah Di SMP Kota Semarang. *Journal of Public Policy And Management Review*, 8(4), 27-39. [10.14710/jppmr.v8i4.24786](https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i4.24786)
- Sine, E. P., Tunti, M. E. D., & Rafael, S. J. M. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi pada sekolah di Kota Kupang). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 1-8. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3925>
- Suryadi, N. I., Ilat, V., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos Reguler Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), 855-865. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.46493>
- Waruwu, H., Togatorop, D., Amelia, I., Berutu, J., & Manullang, T. (2024). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMA Negeri 1 Parmaksian. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(5), 1548-1559. <https://journal.institer.com-edu.org/index.php/multiple/article/view/360>